



Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk Penyusunan APB Desa di Desa Karangsono

Oktavie Fresiliasari ^{1*}

¹ Universitas Semarang; Semarang, Jawa Tengah; e-mail : octafresilia@gmail.com

* Corresponding Author : Oktavie Fresiliasari

Abstract: This study aims to find out the application of the Village Financial System Application (SISKEUDES) is very important to improve the preparation of the Village APB financial statements. This implementation makes a significant contribution to the realization of transparent and accountable management of village fund allocation, resulting in good governance. The research was conducted in Karangsono Village, Mranggen District, Demak Regency. The method used is a qualitative method, especially using a case study approach with in-depth interviews and direct observation. Participants in this study were selected through purposive sampling techniques based on certain criteria, in this case the participants taken from the village apparatus were the Village Head, Head of Finance and Head of Planning. Furthermore, the conclusion of the research results shows that the readiness of the Karangsono Village Government in implementing the Siskeudes application is good. The benefits in the preparation of the Village APB through the Siskeudes application are very helpful in accelerating financial reporting. The Siskeudes application also helps in real time monitoring, automatic calculation and reporting very easily. So that with the Siskeudes application, the performance of the village apparatus is getting better and the results are very significant. It's just that from the implementation of Siskeudes, there are still obstacles from human resources that lack of training and age factors. But over time, Siskeudes operators can adjust the development of the Siskeudes application itself.

Keywords: Implementation; Village Financial Management System; SISKEUDES

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sangat penting untuk meningkatkan penyusunan laporan keuangan APB Desa. Penerapan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terwujudnya pengelolaan alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan tata kelola yang baik. Penelitian dilakukan di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, khususnya menggunakan pendekatan studi kasus dengan wawancara mendalam dan observasi langsung. Partisipan pada penelitian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu dalam hal ini partisipan yang diambil dari perangkat desa adalah Kepala Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan kesiapan Pemerintah Desa Karangsono dalam melaksanakan aplikasi Siskeudes adalah baik. Manfaat dalam penyusunan APB Desa melalui aplikasi Siskeudes sangat membantu sekali mempercepat pelaporan keuangan. Aplikasi Siskeudes juga membantu dalam pemantauan secara real time, penghitungan otomatis dan pelaporan dengan sangat mudah. Sehingga dengan adanya aplikasi Siskeudes tersebut kinerja perangkat desa semakin baik dan hasilnya sangat signifikan. Hanya saja dari penerapan Siskeudes masih ada kendala dari SDM yang kurangnya pelatihan dan faktor usia. Namun seiring berjalannya waktu, operator Siskeudes dapat menyesuaikan pengembangan aplikasi Siskeudes itu sendiri.

Kata kunci: Penerapan; Sistem Pengelolaan Keuangan Desa; SISKEUDES

Received: June 1, 2025

Revised: June 13, 2025

Accepted: July 6, 2025

Published: July 18, 2025

Curr. Ver.: July 18, 2025



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [1], tujuan utama desa adalah untuk menyelenggarakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Undang-undang tersebut memberi desa banyak otoritas, termasuk wewenang untuk mengawasi tata kelola mereka sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup penduduk desa. Pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa, juga tunduk pada kewenangan ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) mengatur pengelolaan keuangan desa, yang berada di bawah kewenangan desa. Pemerintah Desa menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam mengelola keuangan desa [2]. Perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas dana desa semuanya termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan otonomi desa adalah pengelolaan keuangan daerah [3].

Desa adalah unit pemerintahan yang memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, Kepala Desa memimpin pemerintahan desa dan berperan dalam mewujudkan tata kelola yang baik yaitu pelaksanaan tanggung jawab, wewenang, fungsi, hak, dan tugas Kepala Desa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan desa. Salah satu agenda reformasi yang berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah tata kelola pemerintahan yang baik.

Desa memperoleh dana dari berbagai sumber, antara lain hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, pendapatan asli desa, pembagian hasil pajak dan pungutan dari Kabupaten/Kota, dan sebagian dana neraca keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, akuntabilitas Kepala Desa ditunjukkan melalui laporan keuangan yang disusun berdasarkan prosedur akuntansi, yang merupakan salah satu cara untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan [3].

Untuk memfasilitasi penyusunan laporan pengelolaan APB Desa, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2015. Aplikasi ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga desa dapat mengelola keuangannya dengan mudah dan efisien. Aplikasi Siskeudes telah mengalami beberapa pembaruan dan perbaikan oleh pemerintah pusat, sehingga tersedia dalam beberapa versi. Versi yang tersedia antara lain 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, dan versi terbaru adalah versi 2.0.6 yang dirilis pada tahun 2024. Sedangkan untuk versi terbaru, ada fitur tambahan, penambahan, perbaikan dan perubahan default.

Berdasarkan data terbaru, menunjukkan bahwa pengembangan Siskeudes diawali dengan ditetapkannya Surat Edaran Nomor: 147/8350/BPD oleh Kementerian Dalam Negeri.



Gambar 1. Kegunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Sumber: Kominfo

Dari data perkembangan terbaru yang diperoleh penulis, menunjukkan bahwa terdapat tren positif penggunaan aplikasi Siskeudes, yang sangat memudahkan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Data Tren Perkembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
 Sumber: kominfo

Penerapan aplikasi Siskeudes di Indonesia telah diterapkan di banyak desa. Berdasarkan data BPKP, per 31 Desember 2019, cakupan pelaksanaan Siskeudes telah mencapai 95,06% di seluruh desa di Indonesia. Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6 telah diimplementasikan di 71.249 desa di 417 kabupaten dan kota dari total 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota. Namun, masih ada beberapa desa yang belum menerapkan aplikasi Siskeudes. Namun, pada tahun 2024 implementasi aplikasi Siskeudes sepenuhnya diratakan untuk digunakan sebagai penyusunan anggaran desa [4]. Aplikasi Siskeudes bertujuan untuk memungkinkan desa-desa di seluruh Indonesia memanfaatkan fitur-fiturnya secara efektif untuk mengurangi risiko penipuan [5]. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa dan Laporan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Desa.

Sebelum diperkenalkannya Siskeudes, penduduk desa menggunakan MS Excel secara manual dalam format non-standar untuk menyiapkan laporan keuangan, anggaran, dan catatan administrasi. Oleh karena itu, sulit bagi pemerintah Kabupaten untuk mengevaluasi rencana anggaran desa dalam laporan keuangan desa. Dengan demikian, melalui dana desa Siskeudes dapat dikelola secara efektif [6]. Namun, menurut BPKP, masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, antara lain kurangnya pemahaman terhadap aplikasi Siskeudes oleh personel, pelaporan yang belum terintegrasi ke dalam sistem, masih mengandalkan pelaporan manual, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta masih ada kesalahan aplikasi dalam pengolahan data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Siskeudes oleh sumber daya manusia tidak optimal.

Temuan dari beberapa penelitian sebelumnya tentang penerapan Siskeudes memperkuat pernyataan ini. Pelaksanaan Siskeudes dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah daerah, khususnya dalam merampingkan proses akuntansi terkait alokasi dana desa [7]. Namun, kendala seperti keterbatasan kemampuan memanfaatkan aplikasi Siskeudes, serta permasalahan terkait kompetensi pengelola sumber daya manusia, menyebabkan pemanfaatan aplikasi ini tidak optimal dan membutuhkan perhatian dari pemerintah [8]. Selain itu, penerapan Siskeudes yang efektif sering terhambat oleh kesalahan saat entri data [9]. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan desa yang kuat dan terintegrasi, didukung oleh sumber daya manusia yang terampil yang mampu

memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan laporan pengelolaan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Ketepatan waktu pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah secara signifikan dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi [10].

Pembahasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sangat penting untuk meningkatkan penyusunan laporan keuangan APB Desa. Penerapan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terwujudnya pengelolaan alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan tata kelola yang baik. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dalam mengelola aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kendala tersebut menghambat optimalisasi penyusunan laporan keuangan APB Desa. Salah satu kendala yang menonjol adalah kurangnya pemahaman Siskeudes oleh perangkat desa. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pelatihan dari pemerintah pusat dan kurangnya penguasaan teknologi dan informasi. Hal ini menyulitkan untuk mengimplementasikan aplikasi Siskeudes secara efektif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari topik ini dengan fokus pada Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk penyusunan APB Desa.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

2.1. Teori Akuntansi

Teori akuntansi digunakan sebagai kajian untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan dan organisasi menyajikan laporan tersebut dengan menggunakan metode dan strategi yang tepat. Menurut Sadeli (2015) [11] mengungkapkan bahwa akuntansi digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah dan anggota masyarakat lainnya. Dalam sebuah studi tujuan utama dari teori akuntansi ini dilaksanakan agar dapat memberikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi terhadap pihak-pihak terkait, serta dapat melihat ke dalam praktik akuntansi yang sudah ada, bagaimana pihak mengembangkan atau melakukan penambahan pada ilmu akuntansi dari waktu ke waktu. Prinsip akuntansi ini digunakan sebagai kerangka untuk mendapatkan hasil pelaporan keuangan yang akurat.

2.2. Desa

Definisi desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu daerah yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang didasari oleh hukum dan mempunyai batas wilayah serta memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah atau berkuasa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sendiri. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa, bendahara desa serta staf-staf atau perangkat desa lainnya. Kewenangan desa merupakan status hukum desa dalam mengatur dan mengurus desa. Jika desa diistilahkan dengan bangunan, maka kewenangan desa adalah sebagai pondasi dari bangunan tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan desa merupakan landasan bagi penyelenggara pemerintahan dan Pembangunan.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Anggaran pendapatan dan Belanja (APB Desa) adalah instrument penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APB Desa. Dari APB Desa tersebut semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk Pembangunan desa diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya. Dan dalam pengelolaan keuangan desa ini sudah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja

desa dan pembiayaan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.4. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan kebijakan yang dibuat sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana kebijakan tersebut harus dijalankan agar tercapai tujuan dari aplikasi siskeudes yaitu agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Aplikasi keuangan des aini menggunakan database Microsoft Acces sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Kelebihan siskeudes adalah sesuai peraturan, memudahkan tata Kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*built-in internal control*), didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

3. Metode yang Diusulkan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan subjek atau objek yang diteliti fenomena dengan lebih mendalam. Hal ini dicapai dengan mengartikulasikan temuan observasional melalui bahasa deskriptif [12]. Dalam hal ini dilakukan dengan menguraikan Penerapan aplikasi SISKEUDES untuk penyusunan anggaran desa di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Oleh karena itu, penelitian studi kasus adalah investigasi terhadap peristiwa tertentu (kasus) pada waktu dan aktivitas tertentu (program, peristiwa, proses, lembaga atau kelompok sosial) dan melibatkan pengumpulan data yang komprehensif dan mendalam dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data spesifik [13].

Lokasi penelitian ini adalah Desa Karangsono di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Lokasi ini dipilih peneliti karena untuk mengetahui kinerja aparat desa dalam penerapan Siskeudes. Partisipan pada penelitian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria untuk partisipan di antaranya mempunyai pengetahuan atau keahlian di bidangnya masing-masing, serta mempunyai pemahaman yang mendalam seputar aplikasi Siskeudes. Sedangkan untuk kriteria informan ahli adalah individu yang mempunyai pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terkait topik yang digunakan. Dalam hal ini partisipan yang diambil dari perangkat desa adalah Kepala Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Pseudonym	Description
MK	Kepala Desa
RM	Kaur Keuangan
JM	Kaur Perencanaan

Source: Survey Result Data, 2024

Dalam penelitian ini, metode triangulasi digunakan untuk pengujian kualitas data. Seperti yang disampaikan oleh Sugiyono (2020) [14], ketika peneliti memanfaatkan triangulasi untuk pengumpulan data, mereka secara bersamaan menilai kredibilitas data dengan memverifikasinya melalui berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang beragam. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Model Miles dan Huberman (2014) [15]. Model ini melibatkan pengkategorian data yang diperoleh secara sistematis dari wawancara mendalam dan pengamatan langsung, yang memungkinkan perumusan kesimpulan. Model Miles dan Huberman sangat cocok untuk data kualitatif yang dikumpulkan dalam kerangka penelitian studi kasus. Pendekatan analitis ini meliputi pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara kepada partisipan yang telah dipilih. Data yang diperoleh dari wawancara selanjutnya akan dianalisis dengan menguji kualitas data yang kemudian akan diuraikan dan dijelaskan. Berikut merupakan proses triangulasi berdasarkan sumber data yaitu partisipan melalui wawancara mendalam:

4.1. Gambaran Umum mengenai aplikasi Siskeudes

Dari hasil wawancara mendalam, ringkasan jawaban partisipan I, II dan III dapat disimpulkan bahwa gambaran umum mengenai aplikasi Siskeudes itu sendiri pada Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk Pemerintah Desa untuk memudahkan dalam pembuatan rancangan APB des aitau sendiri dan juga pelaporannya dan hasilnya signifikan. Aplikasi ini diberikan Pemerintah Pusat untuk pengelolaan keuangan. Aplikasi ini memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang dulunya diinput secara manual sekarang diinput secara online yang lebih memudahkan dan lebih praktis.

4.2. Kesiapan Pemerintah Desa Karangsono dalam mengintegrasikan dan menerapkan aplikasi Siskeudes

Dari hasil wawancara mendalam, ringkasan jawaban partisipan I, II dan III dapat disimpulkan bahwa dari Pemerintah Desa Karangsono sangat siap untuk melaksanakan sistem tersebut. Selain itu, agar kesiapan menerapkan aplikasi Siskeudes lebih efektif maka dapat mengadakan Bimtek dan bekerjasama dengan Dinpermades. Pengadaann Bimtek tersebut meliputi pelatihan pengelolaan keuangan serta pengadaan infrastruktur teknologi yang diperlukan.

4.3. Aplikasi Siskeudes membantu dalam proses penyusunan APB Desa

Dari hasil wawancara mendalam, ringkasan jawaban partisipan I, II dan III dapat disimpulkan bahwa aplikasi Siskeudes membantu mempercepat dalam pelaporan agar lebih signifikan yang artinya mengurangi waktu yang seharusnya mungkin lam menjadi cepat, yang seharusnya kurang akurat menjadi akurat. Selain itu, aplikasi Siskeudes dapat membantu dalam proses penyusunan APB Desa dengan beberapa cara diantaranya pengelolaan desa yang terpusat dalam arti terintegrasi, pemantauan real time, penghitungan otomatis dan pelaporan yang mudah. Aplikasi tersebut juga sangat membantu karena terdapat parameter sesuai bidang dan sub kegiatan.

4.4. Peran Pemerintah Pusat dalam mendukung penggunaan Siskeudes di Tingkat desa

Dari hasil wawancara mendalam, ringkasan jawaban partisipan I, II dan III dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Pusat secara langsung tidak ada. Namun peran Pemerintah sebagai sarana atau alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis informasi agar mempermudah Pemerintah Desa dalam perencanaan dalam pelaksanaan, penatausahaan pelaporan serta terdapat perwakilan Perangkat Desa untuk melaksanakan Bimtek Siskeudes. Pelaksanaan Bimterk tersebut bisa dari Pemerintah Kabupaten, Tingkat Provinsi, BPK serta Inspektorat Provinsi.

4.5. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Karangsono dalam menerapkan Aplikasi Siskeudes

Dari hasil wawancara mendalam, ringkasan jawaban partisipan I, II dan III dapat disimpulkan bahwa terkendala Sumber Daya Manusia karena faktor usia dan penyesuaian. Kemudian Kendala sistem keuangan yang masih terbilang rumit bagi Sebagian operator, serta kurangnya pelatihan dan sering terjadinya eror pada sistem aplikasi. Selain itu, selisih jumlah yang terkadang harus mencari untuk menyamakan jumlah yang terinput.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, gambaran umum mengenai aplikasi Siskeudes merupakan salah satu bentuk komitmen dari BPKP untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, serta sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa dalam rangka penerapan, BPKP mengembangkan sistem dengan menggunakan database Microsoft Access untuk pengelolaan keuangan desa yaitu, aplikasi Siskeudes. Tujuan ditetapkannya aplikasi Siskeudes, yaitu yang pertama memastikan seluruh

ketentuan dan kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terutama terkait keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik pada tingkatan Pemerintah. Tujuan yang kedua Pemerintah Desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kesiapan Pemerintah Desa Karangsono dalam melalui aplikasi Siskeudes dengan mempersiapkan sarana prasarana seperti laptop atau komputer, SDM yang ditunjuk sebagai operator aplikasi Siskeudes serta melaksanakan pelatihan mengenai pengembangan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes akan meningkatkan pengawalan desa untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa. Siskeudes dapat dioperasikan dengan baik pada operating system Windows seperti WindowsXP, Windows7 dan Windows8. Selain dengan menggunakan operating system Windows tersebut, maka aplikasi Siskeudes tidak dapat diimplementasikan.

Adapun manfaat dari aplikasi Siskeudes tersebut mempercepat pelaporan keuangan yang dulunya manual sekarang menjadi online. Bisa memangkas waktu proses penyusunan APB Des lebih cepat, praktis dan terintegrasi. Selain dari itu aplikasi Siskeudes membantu pemantauan secara real time, penghitungan otomatis dan pelaporan yang mudah. Output yang dihasilkan dari aplikasi Siskeudes berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu pertama Dokumen Penatausahaan terdiri dari bukti penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Setoran Pajak (SSP), kedua Laporan-laporan yang terdiri dari laporan penganggaran (APBDes, RAB, APB Des per sumber dana), dan laporan penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register dokumen penatausahaan).

Tentunya sebuah aplikasi tidak serta merta sejalan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Desa, masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses berjalannya waktu. Beberapa diantaranya kualitas SDM perangkat desa yang belum maksimal karena faktor usia. Selain itu pada aplikasi Siskeudes itu sendiri sering terjadi eror sistem. Apalagi saat aplikasi tersebut mengalami pengembangan versi, secara tidak langsung operator Siskeudes harus melakukan pelatihan Bimtek dan penyesuaian. Saat penyusunan rancangan APB Des kendalanya selisih jumlah yang terkadang harus mencari untuk menyamakan jumlah yang terinput. Proses rencana kegiatan juga harus menunggu acuan dari Pemkab, agar semua rencana kegiatan pada Pemerintah Desa Karangsono sesuai dengan parameter di dalam aplikasi Siskeudes.

Dalam penjelasan lain bahwa Aplikasi Siskeudes merupakan kemajuan signifikan dalam evolusi teknologi yang cepat, menawarkan berbagai manfaat seperti yang terungkap selama proses wawancara. Temuan menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes berperan penting dalam membantu pemerintah desa untuk membangun praktik pengelolaan keuangan yang akuntabel, sekaligus meningkatkan efisiensi, sehingga membebaskan lebih banyak waktu untuk kegiatan desa lainnya. Sebelum pelaksanaan aplikasi Siskeudes, para pejabat menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan desa secara efektif. Namun, setelah semua data yang relevan dimasukkan ke dalam aplikasi, prosesnya menjadi jauh lebih sederhana, menghasilkan laporan keuangan yang andal. Selain itu, aplikasi Siskeudes selaras dengan peraturan yang ada, memudahkan keterlibatan pengguna, merampingkan tugas pengelolaan keuangan bagi aparat desa, menggabungkan sistem pengendalian internal yang kuat, dan mencakup pedoman penggunaan komprehensif yang diberikan langsung oleh BPKP (Sulina et al., 2017) [16].

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang dilakukan serta pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kesiapan Pemerintah Desa Karangsono dalam melaksanakan aplikasi Siskeudes adalah baik. Pemerintah Desa Karangsono menyiapkan sarana dan prasarana terkait perangkat teknologi seperti laptop dan komputer dengan spesifikasi yang sesuai dengan aplikasi Siskeudes. Selain itu, Pemerintah Desa Karangsoo juga menunjuk 2 (dua) orang aparat desa sebagai operator aplikasi Siskeudes. Dalam hal ini, pejabat desa adalah Kepala Keuangan dan Kepala Perencanaan.

Penerapan dalam penyusunan APBDesa melalui aplikasi Siskeudes sangat membantu dalam mempercepat pelaporan keuangan. Aplikasi Siskeudes juga membantu pemantauan waktu nyata, perhitungan otomatis, dan pelaporan dengan sangat mudah. Sehingga dengan adanya aplikasi Siskeudes, kinerja perangkat desa semakin baik dan hasilnya sangat signifikan. Selanjutnya, dari penerapan Siskeudes dalam penyusunan APBDesa, kendala aplikasi Siskeudes sendiri terletak pada sumber daya manusia perangkat desa, dimana kesalahan sistem sering terjadi pada aplikasi Siskeudes, kurangnya pelatihan bagi operator Siskeudes. Namun seiring berjalannya waktu, operator Siskeudes dapat menyesuaikan pengembangan aplikasi Siskeudes itu sendiri. Manfaat dalam penyusunan APB Desamelalui aplikasi Siskeudes sangat membantu sekali mempercepat pelaporan keuangan. Aplikasi Siskeudes juga membantu dalam pemantauan secara real time, penghitungan otomatis dan pelaporan dengan sangat mudah. Sehingga dengan adanya aplikasi Siskeudes tersebut kinerja perangkat desa semakin baik dan hasilnya sangat signifikan.

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan, yaitu, Pemerintah Desa Karangsono harus menyiapkan upgrade perangkat teknologi terkini seperti laptop atau komputer. Serta melakukan pemeriksaan berkala terhadap perangkat teknologi tersebut. Selain itu, melakukan pelatihan mandiri bagi operator Siskeudes dengan mengundang pihak yang kompeten terkait aplikasi Siskeudes dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten. Dan selanjutnya diperlukan perhatian lebih dalam mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia agar masalah keterbatasan SDM tidak berlarut-larut dalam menerapkan kebijakan berbasis aplikasi komputer. Terjadinya kesalahan sistem aplikasi Siskeudes harus diperbaiki sesegera mungkin dari pengembang aplikasi Siskeudes.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 2014, pp. 1–103. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, “Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” pp. 1–120, 2018, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- [3] S. W. Hasanah and B. Setiawati, “Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desaa (SISKEUDES) di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong,” *J. Mhs. Adm. Publik dan Adm. Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 215–228, 2022.
- [4] H. Rizal Machfuz and E. Priyanti, “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Apbdes Di,” *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 8, no. 11, pp. 93–100, 2022, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6830281>.
- [5] A. Ningsih, S. Nurhaliza, and E. Priyanti, “Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu,” *J. Gov. Sci. J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–21, 2022, doi: [10.54144/govsci.v3i1.14](https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14).
- [6] A. Fitriansyah and M. Halilintar, “Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) in Bandarjo Village,” *Educity Kaji. Ilmu Sos. dan Pendidik.*, vol. 3, no. 7, pp. 484–495, 2024, doi: [10.57096/edunity.v3i7.255](https://doi.org/10.57096/edunity.v3i7.255).
- [7] Hasniati, “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *J. Anal. Kebijkak. dan Pelayanan Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 15–30, 2016.
- [8] M. Contrafatto, I. Thomson, and E. A. Monk, “Peru, mountains and los niños: Dialogic action, accounting and sustainable transformation,” *Crit. Perspect. Account.*, vol. 33, 2015, doi: [10.1016/j.cpa.2015.04.009](https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.04.009).
- [9] J. M. Malahika, H. Karamoy, and R. J. Pusung, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara),” *J. Ris. Akunt. Going Concern*, vol. 13, no. 4, pp. 578–583, 2018, doi: [10.32400/gc.13.04.21514.2018](https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018).
- [10] R. H. McLeod and H. Harun, “Public Sector Accounting Reform at Local Government Level in Indonesia,” *Financ. Account. Manag.*, vol. 30, no. 2, pp. 238–258, 2014.

-
- [11] L. M. Sadeli, *Dasar Dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- [12] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [13] J. W. Cresswell, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. SAGE Publication, 1998.
- [14] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- [15] J. Miles, M.B, Huberman & Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: SAGE Publication, 2014.
- [16] I. G. A. T. Sulina, M. A. Wahyuni, and P. S. Kurniawan, "Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)," *J. Ilm. Mhs. Akuntansi Univ. Pendidik. Ganesha*, 2017, doi: <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13197>.